

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks dinamika politik global yang kompleks, keberadaan aktor non-negara semakin mendapat perhatian dalam studi hubungan internasional. Salah satu aktor yang memiliki pengaruh signifikan dengan membawa identitas agama adalah Paus sebagai kepala Gereja Katolik. Tidak hanya menjalankan peran sebagai pemimpin spiritual bagi lebih dari satu miliar umat Katolik di seluruh dunia, keberadaan Paus juga berfungsi sebagai aktor diplomatik, perantara dalam konflik, serta pembentuk wacana moral yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi arah kebijakan global. Selain menjadi kepala Gereja Katolik, Paus merupakan pemimpin negara Kota Vatikan dan juga perwakilan dari Tahta Suci atau biasa disebut dengan The Holy See (Ryal, 2001).

Berdasarkan hukum Kanonik, The Holy See berfungsi sebagai badan yang mengatur Gereja Katolik. Susunan struktur The Holy See terdiri dari Paus dan Kuria Roma, yang terbagi lagi menjadi beberapa departemen dan lembaga untuk membantu Paus dalam menjalankan Gereja (O'Brien & Morello, 2013). Kuria Roma sendiri tersusun atas Sekretariat Negara, 9 Kongregasi, 3 Pengadilan, 11 Dewan Kepausan, hingga beberapa komisi kecil (Lajolo, 2005). Di dalam Sekretariat Negara, terdapat dua bagian dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pertama adalah bagian umum, bertugas untuk memastikan kelancaran pelayanan harian yang dilakukan oleh Paus, mengatur pekerjaan seluruh departemen di Kuria Roma, serta menyiapkan dan mengawasi

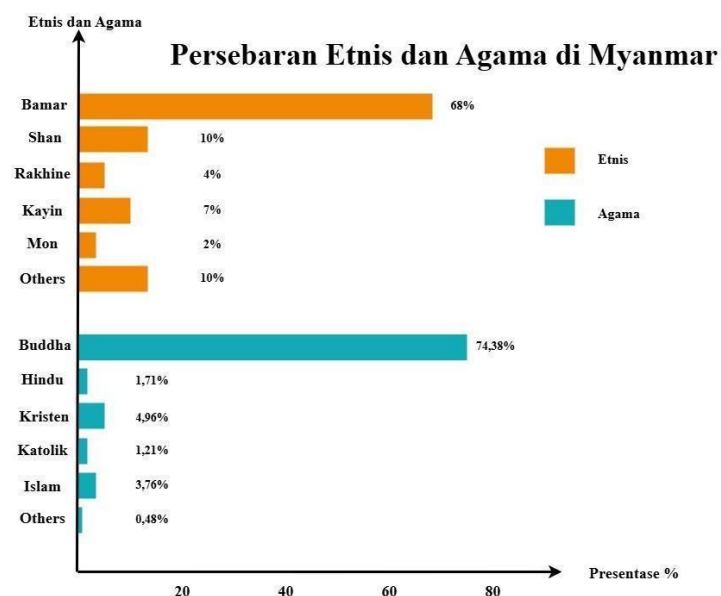
aktivitas surat menyurat dan dokumen-dokumen milik Paus. Kedua adalah bagian hubungan dengan negara lain, yang memiliki tugas untuk melakukan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hubungan diplomatik (Lajolo, 2005).

Selain melakukan hubungan diplomatik dengan banyak negara, The Holy See dibantu dengan Sekretariat negara bagian hubungan dengan negara juga melakukan kegiatan diplomatik dengan subjek hukum publik internasional dan organisasi internasional (Lajolo, 2005). Hal tersebut dapat terlihat ketika The Holy See memiliki hubungan diplomatik dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga ditetapkan menjadi pengamat tetap PBB pada 6 april 1964. Tidak hanya menjadi pengamat tetap PBB, The Holy See juga mempunyai status sebagai pengamat tetap di Organisasi negara-negara Amerika (OAS) dan Uni Afrika (Lajolo, 2005). Sebagai perwakilan The Holy See, Paus telah menjalin hubungan diplomatik dengan 182 negara serta menjalin hubungan khusus dengan Federasi Rusia dan Organisasi pembebasan Palestina (Lajolo, 2005).

Keterlibatan The Holy See di politik global, memiliki perbedaan dibandingkan dengan negara-negara lain. Disaat negara-negara lain berfokus pada kepentingan nasional negaranya sendiri, The Holy See justru berusaha fokus untuk kebaikan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat internasional tanpa terkecuali. Dengan fokus dan tujuan tersebut, keterlibatan The Holy See tidak hanya terbatas pada masalah regional, melainkan pada berbagai macam isu yang terjadi di seluruh dunia. The Holy See memanfaatkan doktrin sosial Katolik dengan pengalaman sebagai bentuk keterlibatannya dalam setiap negosiasi, penyelesaian konflik, ataupun tindakan kemanusiaan (Maulana, 2024).

Sebagai entitas berbasis agama, bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan The Holy See selalu menekankan bahwa kebenaran terletak pada pengaruh moral, bukan hanya pada sumber material saja (Poisson, 2024). Menurut beberapa akademisi yang mengkaji terkait dengan Papal Diplomacy, menyatakan bahwa salah satu mekanisme utama yang digunakan dalam melaksanakan Papal Diplomacy adalah melalui penyampaian pidato-pidato resmi (Poisson, 2024; P. Barbato, J. Joustra, & R. Hoover, 2019). Penelitian ini mengacu pada buku berjudul “*Nature & Function of Papal Diplomacy*” milik Giovanni Lajolo pada tahun 2005 sebagai kerangka berpikir utama. Oleh sebab itu, *Papal Diplomacy* memiliki peran penting bagi wilayah berkonflik, khususnya di Asia Tenggara.

Myanmar merupakan negara yang terkenal multietnis, karena memiliki keragaman akan identitas suku, budaya, dan agamanya. Penulis mencoba untuk memberikan informasi yang dapat dipahami dengan mudah terkait keragaman negara Myanmar melalui grafik batang berikut:



Gambar 1 1. Grafik Batang Demografi Myanmar

Sumber: (Myanmar Population 2025, 2025), (National Profiles: Burma (Myanmar), 2025)

Catatan: Hasil Rekontruksi Penulis

Memiliki komposisi demografi yang majemuk, membuat Myanmar lebih rentan terhadap konflik berbau etnis dan politik, terlebih jika pemerintah membuat kebijakan yang cenderung memihak kepada kelompok mayoritas (Iskandar & Ridho). Meskipun Myanmar mempunyai peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-undang pasal 12 dan 147 terkait kebebasan bagi masyarakat Myanmar untuk memilih dan menjalankan agama masing-masing, dengan menyebutkan bahwa pemerintah menjamin kesetaraan dalam hukum tanpa melihat ras, agama, status, maupun jenis kelamin (Ali, 2022). Tetapi dalam realitanya, pemerintah masih mengontrol dan menguasai kehidupan beragama masyarakat Myanmar (Iskandar & Ridho).

Hal tersebut dapat ditelusuri melalui struktur pemerintahan Myanmar didominasi oleh kursi-kursi dari etnis mayoritas yang bersatu dengan kelompok militer (Iskandar & Ridho). Mulai saat itulah, konflik terus menerus terjadi di Myanmar dengan berbagai macam waktu dan kejadian, berikut rangkuman konflik yang telah dibuat dan digambarkan ulang oleh penulis:

Tabel 1 1. Ringkasan Konflik Myanmar

KONFLIK MYANMAR (2015-2025)		
Nama Konflik	Waktu Kejadian	Penjelasan
Konflik di Shan dan Khong	Februari – Juni 2015	Pertempuran yang terjadi antara kelompok militer dengan etnis Shan Utara, menyebabkan 200 korban dan 5.000 ribu masyarakat sipil mengungsi ke Tiongkok

Konflik Rohingya	Oktober 2016 Sekarang	-Kelompok militer Myanmar melakukan operasi pembersihan atas etnis Rohingya yang berada di wilayah Rakhine, akibatnya sebanyak 200.000 ribu orang meninggal dunia dan 700.000 ribu orang terpaksa mengungsi ke Bangladesh
Kudeta Militer	1 Februari 2021	Kelompok militer Myanmar mengambil alih pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, hingga memicu protes massal dan PDF (People's Defence Force)
Pertempuran Thaw Le Hta	April 2021	KNLA (Karen National Liberation Army) merupakan kelompok organisasi yang memperjuangkan hak-hak suku Karen, merebut pangkalan militer, di daerah perbatasan Myanmar hingga terjadi serangan balasan yang dilakukan oleh kelompok militer.

Sumber: (McKenna, Teekah, 2021), (Human Rights Watch, 2024), (Iyabu, 2021), (UNHCR, 2024)

Catatan: Tabel ditulis dan dibuat ulang oleh Penulis

Berkaitan dengan Myanmar sebagai kasus yang dipilih pada penelitian ini, Penulis memberikan beberapa contoh aktivitas *Papal Diplomacy* yang menggunakan pidato sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, sekaligus menjadi tinjauan pustaka penulis dalam menuntaskan penelitian ini. Pertama adalah jurnal berjudul “*Offering Peace in the Holy Land: The Diplomacy of the Vatican in Israel-Palestine Conflict*” yang ditulis oleh Ana Maulana, jurnal ini berfokus pada keterlibatan The Holy See atas konflik Israel dengan Palestina pada masa kepemimpinan Paus Fransiskus. The Holy See melakukan berbagai upaya agar gencatan senjata dapat diberhentikan dan eskalasi dapat berakhir, hingga menyerukan untuk mendesak *United Nations Relief and Works Agency* (UNRWA) agar tetap memberikan bantuan bagi para pengungsi Palestina saat misa minggu di Vatikan (Maulana, 2024).

Kedua adalah jurnal berjudul “Diplomasi Vatikan dalam Normalisasi Hubungan Amerika Serikat - Kuba” yang ditulis oleh Yunique Benu, jurnal ini membahas terkait peran nyata The Holy See dalam memfasilitasi dialog untuk konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Kuba. Meskipun telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Amerika Serikat dan pemimpin Kuba, namun langkah pertama yang dibuat Paus Fransiskus untuk rekonsiliasi adalah melalui pidato-pidatonya (Benu, 2017). Ketiga adalah jurnal berjudul “*Pacem In Terris* dalam Kebijakan Luar Negeri Tahta Suci Vatikan terhadap Konflik Suriah” yang ditulis oleh Nadya Yolanda Nainggolan, Mohamad Rosyidin, Muhammad Faizal Alfian, jurnal ini membahas The Holy See dalam berpartisipasi memperjuangkan perdamaian Suriah. Selain melalui pertemuan yang dilakukan dengan beberapa pemimpin negara terkait dengan konflik Suriah, Paus Fransiskus juga mengajak negara-negara lain untuk bersatu dalam meraih perdamaian di Suriah melalui konferensi-konferensi internasional seperti pertemuan Jenewa tahun 2014, konferensi mendukung masa depan Suriah dan kawasan tahun 2017, hingga pada sidang umum PBB tahun 2017 dan 2018 (Nainggolan, Rosyidin, Alfian, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan kesimpulan bahwa masih belum ada penelitian dengan topik pembahasan peran *Papal Diplomacy* dalam menyelesaikan konflik melalui pidato yang terjadi di Myanmar. Maka dari itu, penulis ingin mengisi ruang kekosongan tersebut dengan memberikan interpretasi baru. Terlebih lagi konflik yang terjadi di Myanmar merupakan konflik berskala regional namun sudah menjadi besar hingga menarik perhatian dunia Internasional. Salah satunya termasuk The Holly See, sebagai salah

satu aktor non negara yang aktif memberikan suara atas konflik Myanmar.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang masalah serta data yang sudah dijelaskan, berikut rumusan masalah yang akan dianalisis penulis melalui bab pembahasan nantinya, yaitu “Bagaimana praktik *Papal Diplomacy* yang dilakukan oleh Paus Fransiskus melalui pidato-pidatonya pada konflik di Myanmar tahun 2021 hingga 2025?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam pemenuhan program sarjana S1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam terkait praktik *Papal Diplomacy* yang dilakukan oleh Paus Fransiskus melalui pidato-pidatonya dalam konflik politik dan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tahun 2021 hingga akhir masa hidupnya, serta mengidentifikasi bentuk keterlibatan Paus Fransiskus untuk dapat mempengaruhi dinamika internasional dalam mendorong perdamaian dan perlindungan hak-hak asasi manusia di negara Myanmar.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Papal Diplomacy (Diplomasi Kepausan

Konsepsi *Papal Diplomacy* yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada buku milik Giovanni Lajolo tahun 2005. Menurut Lajolo, *Papal Diplomacy* merupakan sebuah aktivitas pastoral yang memiliki tujuan untuk melayani umat manusia dan dunia secara keseluruhan, dengan berlandaskan pada pedoman yang diberikan Paus selaku otoritas tertinggi Gereja Katolik. Tidak hanya itu, Lajolo juga memberikan penekanan bahwa *Papal Diplomacy* bukan hanya sekedar berkaitan dengan urusan politik, melainkan juga berperan dalam menyampaikan nilai-nilai moral dan spiritual Gereja katolik kepada semua masyarakat global tanpa terkecuali (Inside The Vatican, 2013). Selain pengertian dari Lajolo, menurut Laskowska & Marcynski *Papal Diplomacy* merupakan satu-satunya bentuk diplomasi yang hanya dimiliki oleh Vatikan, sekaligus menjadi salah satu ciri khas dari Gereja Katolik. Keistimewaan *The Holly See* dibandingkan dengan negara atau organisasi internasional lainnya terletak pada kedaulatan spiritualnya (Laskowska & Marcynski, 2022).

Sejarah *Papal Diplomacy* dimulai sejak awal perkembangan Kekristenan, di mana para pemimpin gereja mengalami tantangan besar ketika hendak menyatukan berbagai budaya dan tradisi kedalam satu kesatuan iman, yang mencerminkan sifat universal dari Gereja Katolik. Akibatnya adalah muncul berbagai bentuk perselisihan, kontroversi, hingga perpecahan, sebagai upaya penyelesaian perselisihan tersebut, dilakukannya sebuah konsili yang berfungsi sebagai forum untuk membahas seluruh permasalahan dengan menyertakan aturan kedisiplinan. Pengertian Konsili sendiri dapat diartikan sebagai pertemuan tertinggi dengan melibatkan para uskup. Titik awal persebaran konsili dan utusan paus ke seluruh dunia adalah saat perselisihan tersebut berhasil diselesaikan oleh Paus dan telah

mencapai pada kesatuan gereja, hingga pada akhirnya nama Legatus muncul pertama kalinya sebagai utusan Kepausan. Dalam praktiknya, utusan Kepausan pertama kali terjadi saat masa kepemimpinan Paus Julius pada tahun 343M sekaligus menjadi utusan yang bertindak atas nama Paus dan diakui secara resmi dengan nama Nuncio Apostolik (Lajolo, 2005).

Nuncio Apostolik dapat diartikan sebagai duta besar Kepausan yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan tugas dengan misi diplomatik dan misi keagamaan di suatu negara. Adanya perkembangan zaman, membuat keberadaan diplomasi mengalami reformasi yang akhirnya merubah susunan awal dari diplomasi itu sendiri. Namun hal tersebut, ikut terbaharukan melalui perjanjian-perjanjian seperti Perjanjian *Westphalia* tahun 1648 dan Kongres Wina tahun 1815 untuk mendefinisikan ulang terkait hubungan antar negara. Kongres Wina secara khusus mengesahkan prinsip dasar dari *Papal Diplomacy*, yaitu mengakui bahwa Paus hadir tidak hanya sebagai pemimpin sekuler melainkan yang utama sebagai pemimpin spiritual Gereja Katolik (Lajolo, 2005).

Isi dari Konvensi Wina khususnya Hubungan Diplomatik tahun 1961, menekankan terkait hak Kepausan untuk tetap mengirimkan utusan serta menerima akreditasi dari perwakilan diplomatik. Tidak hanya itu, pada pasal 14 Konvensi Wina tertulis dengan jelas bahwa duta besar dan Nunsius yang diberikan tugas serta tanggung jawab kepada kepala Negara memiliki status setara dalam hal urusan diplomatik (Lajolo, 2005). Mengutip perkataan dari Barbato, The Holy See sebagai otoritas tertinggi Gereja Katolik dan menjadi lembaga keagamaan di dunia mempunyai akses untuk melakukan komunikasi internasional, menjalankan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, hingga terlibat secara langsung

dalam hukum internasional (P. Barbato, Joustra, & R. Hoover, 2019).

Buku milik Lajolo yang berjudul “*Nature & Function of Papal Diplomacy*” juga turut menjelaskan bahwa kegiatan diplomatik yang dilakukan The Holy See berakar pada misi spiritual Gereja Katolik, dengan tujuan untuk mengkampanyekan perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia melalui pidato sebagai salah satu alat utama dalam menyampaikan pesan diplomatik (Lajolo, 2005). Di tengah situasi perpecahan ideologis yang semakin menguat dan meningkatnya berbagai krisis kemanusiaan di dunia, pidato-pidato yang disampaikan oleh The Holy See melalui Paus semakin relevan dan bernilai strategis sebagai alat diplomasi yang membawa pesan moral dan perdamaian bagi komunitas global. Terlebih Lajolo menegaskan melalui bukunya bahwa pidato Paus tidak semata-mata hanya ungkapan teologis, melainkan juga berfungsi sebagai media diplomatik yang ditujukan untuk mendorong respon kolektif terhadap berbagai persoalan global (Lajolo, 2005).

Lajolo menjelaskan bahwa Diplomasi Kepausan mempunyai dua peran yang utama. Pertama adalah peran representative, di mana *Papal Diplomacy* menjadi perwakilan dari *The Holly See* dalam menjalani hubungan internasional dalam hal memelihara komunikasi dengan negara-negara dan organisasi-organisasi internasional. Kedua adalah peran pastoral, memiliki tujuan untuk mendukung misi spiritual Gereja melalui upaya mendorong perdamaian, keadilan hingga perlindungan akan hak-hak asasi manusia secara global. Langkah yang dilakukan Paus untuk menciptakan perdamaian terlihat melalui pidato-pidato yang disampaikan disetiap acara atau momen tertentu. Ketika menjalani kegiatan diplomatiknya, Lajolo menyebutkan ada beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk memandu berjalannya *Papal Diplomacy*:

Pertama dan terutama, adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar setiap manusia di berbagai aspek kehidupan yang meliputi: hak untuk hidup pada setiap tahap perkembangan individu, hak untuk kebebasan berekspresi, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan beragama, serta hak untuk diberikan tempat yang sentral dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Prinsip ini dapat dibuktikan lewat keaktifan *The Holly See* berpartisipasi dalam konferensi Internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam pidato saat hari jadi ke-50 tahun 1995 di hadapan PBB, Paus Yohanes Paulus II memberikan pernyataan kepada Majelis Umum PBB bahwa:

“Universal longing for freedom is truly one of the distinguishing marks of our time. It is precisely the global character of this worldwide movement to freedom which offers us its first and fundamental key and confirms that there are indeed universal human rights, rooted in the nature of the person. It is a matter of serious concern that some people today deny the universality of human rights” - Paus Yohanes Paulus II (Lajolo, 2005, p. 23).

Merujuk pada prinsip pertama yang disampaikan Lajolo mengenai pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia di berbagai aspek kehidupan seperti: hak untuk hidup pada setiap tahap perkembangan individu, hak untuk kebebasan berekspresi, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan beragama, serta hak untuk diberikan tempat yang sentral dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pembuktian tersebut terlihat melalui kalimat yang berbunyi *first and fundamental key and confirms that there are indeed universal human rights*. Kalimat tersebut menegaskan bahwa setiap manusia berhak untuk memiliki hak-hak asasi manusia tanpa terkecuali. Menurut Paus Yohanes Paulus II hak-hak asasi manusia yang dihormati dan dijunjung tinggi merupakan landasan bagi perdamaian dan keadilan global.

Kedua, adalah prinsip untuk menekankan pentingnya perdamaian dan upaya menyelesaikan perselisihan tanpa kekerasan, serta pentingnya pemulihan setelah konflik untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Pembuktian prinsip ini adalah ketika The Holly See menandatangani dan meratifikasi perjanjian tentang non-proliferasi senjata nuklir pada tahun 1971, larangan penggunaan personel ranjau darat pada tahun 1997, Konvensi larangan penggunaan senjata kimia pada tahun 1999, perjanjian perlucutan senjata utama, serta Konvensi Jenewa. Saat masa kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II dirinya mengecam dengan keras aksi terorisme, bahkan saat berlangsungnya sidang umum PBB ke-59 Paus Yohanes Paulus II memberikan pernyataan sekaligus pengingat kepada seluruh umat manusia:

“even if we accept that, under some circumstances, a limited and strictly conditioned use of force could be inevitable in order to fulfil the responsibility to protect every State and the international community, we are called to be realistic enough to recognize that peaceful resolutions are possible and no effort should be spared in achieving them” - Paus Yohanes II (Lajolo, 2005, p. 25)

Mengacu pada prinsip kedua Lajolo terkait pentingnya perdamaian dan upaya menyelesaikan perselisihan tanpa kekerasan, serta fokus pemulihan setelah konflik untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kalimat yang berbunyi *we are called to be realistic enough to recognize that peaceful resolutions are possible and no effort should be spared in achieving them*. Maksud dari kalimat tersebut adalah penyelesaian konflik dapat dilakukan secara damai dan sangat mungkin untuk dilakukan. Paus Yohanes Paulus II menegaskan dalam pidatonya, bahwa untuk mencapai perdamaian bisa tercapai apabila ada kemauan dan usaha bersama.

Ketiga, yaitu prinsip dengan menekankan bahwa demokrasi yang autentik, proses pemilihan harus dilakukan dengan kesadaran penuh, pengetahuan yang memadai, dan kebebasan dalam menentukan pilihan. Prinsip ini dapat dibuktikan melalui tulisan Paus Yohanes Paulus II dalam Surat Ensiklik Centesimus Annus pada tahun 1991:

“Authentic democracy is possible only in a State ruled by law, and on the basis of a correct conception of the human person. If there is no ultimate truth to guide and direct political activity, then ideas and convictions can easily be manipulated for reasons of power. As history demonstrates, a democracy without values easily turns into open or thinly disguised totalitarianism.” - Paus Yohanes Paulus II (Lajolo, 2005, p. 26)

Berdasarkan prinsip ketiga yang disampaikan oleh Lajolo yaitu prinsip dengan penekanan bahwa demokrasi yang autentik proses pemilihan harus dilakukan dengan kesadaran penuh, pengetahuan yang memadai, dan kebebasan dalam menentukan pilihan. Prinsip tersebut dapat dibuktikan melalui kalimat yang berbunyi *If there is no ultimate truth to guide and direct political activity, then ideas and convictions can easily be manipulated for reasons of power*. Kalimat tersebut memberikan penekanan bahwa kebenaran menjadi dasar dalam pelaksanaan demokrasi, tanpa campur tangan kekuasaan. Selain itu, Paus Yohanes Paulus II menyampaikan melalui pidatonya bahwa bentuk demokrasi sehat harus sejalan terhadap nilai-nilai moral dan hak asasi manusia.

Keempat, adalah penekanan terhadap pentingnya hukum internasional sebagai dasar yang menjaga tatanan dunia, dengan menghormati kesetaraan dan hak negara-negara untuk menentukan nasib mereka sendiri, serta mendukung kerjasama antar negara melalui diplomasi multilateral. Prinsip ini dapat dibuktikan melalui

dukungan Paus Paulus VI kepada PBB, melalui pidatonya dalam rangka peringatan berdirinya PBB ke-20 tahun:

“Our Message is meant to be first of all, a solemn moral ratification of this lofty Institution. It is as an ‘expert on humanity’ that we bring this organization the support and approval of our recent predecessors, that of the Catholic hierarchy, and our own, convinced as we are that this organization represents the obligatory path of modern civilization and world peace. You sanction the great principle that relationships between nations must be regulated by reason, justice, law, and negotiation, and not by force, violence, war, nor, indeed, by fear and deceit.” - Paus Paulus VI (Lajolo, 2005, p. 27).

Merujuk pada prinsip keempat yang disampaikan Lajolo terkait penekanan terhadap pentingnya hukum internasional sebagai dasar yang menjaga tatanan dunia, dengan menghormati kesetaraan dan hak negara-negara untuk menentukan nasib mereka sendiri, serta mendukung kerjasama antar negara melalui diplomasi multilateral. Pembuktian tersebut terlihat melalui kalimat yang berbunyi *that of the Catholic hierarchy, and our own, convinced as we are that this organization represents the obligatory path of modern civilization and world peace*. Kalimat tersebut menegaskan bahwa organisasi internasional dianggap sebagai salah satu institusi utama yang memainkan peran sentral dalam menciptakan perdamaian dunia berkelanjutan. Paus Paus VI juga memberikan pernyataan Gereja Katolik yakin bahwa PBB sebagai salah satu organisasi internasional adalah wadah yang tepat untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian global.

Kelima sebagai prinsip terakhir, tujuan dari Papal diplomasi yaitu untuk memperjuangkan nilai-nilai moral dan etika, bukan untuk mengejar keuntungan baik dari segi politik, ekonomi, maupun kekuatan militer. Melalui pidato yang disampaikan Paus Paulus VI di hadapan Majelis Umum PBB pada tahun 1965,

menjadi pembuktian dari prinsip terakhir ini.

“The man who is speaking to you is a man that has no temporal power, no ambition to enter into competition with you. As a matter of fact, we have nothing to ask, no question to raise; at most a desire to formulate: that of being allowed to serve you in the area of our competence, with disinterestedness, humility and love” - Paus Paulus VI (Lajolo, 2005, p. 28).

Mengacu pada prinsip kelima sekaligus prinsip terakhir milik Lajolo adalah tujuan dari Papal Diplomacy yaitu untuk memperjuangkan nilai-nilai moral dan etika, bukan untuk mengejar keuntungan baik dari segi politik, ekonomi, maupun kekuatan militer. Prinsip tersebut dapat dibuktikan melalui kalimat yang berbunyi *that of being allowed to serve you in the area of our competence, with disinterestedness, humility and love*. Maksud dari kalimat tersebut adalah Paus sebagai perwakilan dari The Holy See tidak berambisi terhadap kekuasaan yang bersifat duniawi, melainkan hanya berfokus pada dukungan dan pelayanan dengan sikap rendah hati, tanpa pamrih, dan penuh kasih. Paus Paulus VI juga menambahkan bahwa Gereja Katolik akan berkomitmen untuk berkontribusi secara positif demi mencapai perdamaian dan keadilan global.

Pidato dan bahasa diplomasi yang digunakan oleh Paus dalam Papal diplomacy, juga merupakan hal yang sering ditemui pada praktek diplomasi oleh aktor-aktor negara maupun non negara lainnya. Sebagai sarana komunikasi resmi, pidato memiliki peran untuk memperkuat praktik diplomasi melalui penyampaian pesan secara sopan, bijaksana, dan tepat sehingga hubungan antar negara dapat bertahan dan terjalin harmonis. Dalam beberapa dekade terakhir, pidato khususnya pidato kenegaraan sudah menjadi alat yang penting untuk menyampaikan kebijakan politik luar negeri suatu negara (Oktaviani & Nursidah, 2025). Pidato bahkan dapat

diinterpretasikan sebagai upaya membangun dan memperkuat kekuasaan melalui media massa dengan memanfaatkan unsur-unsur kebahasaan secara strategis (Asmara & Kusumaningrum, 2020).

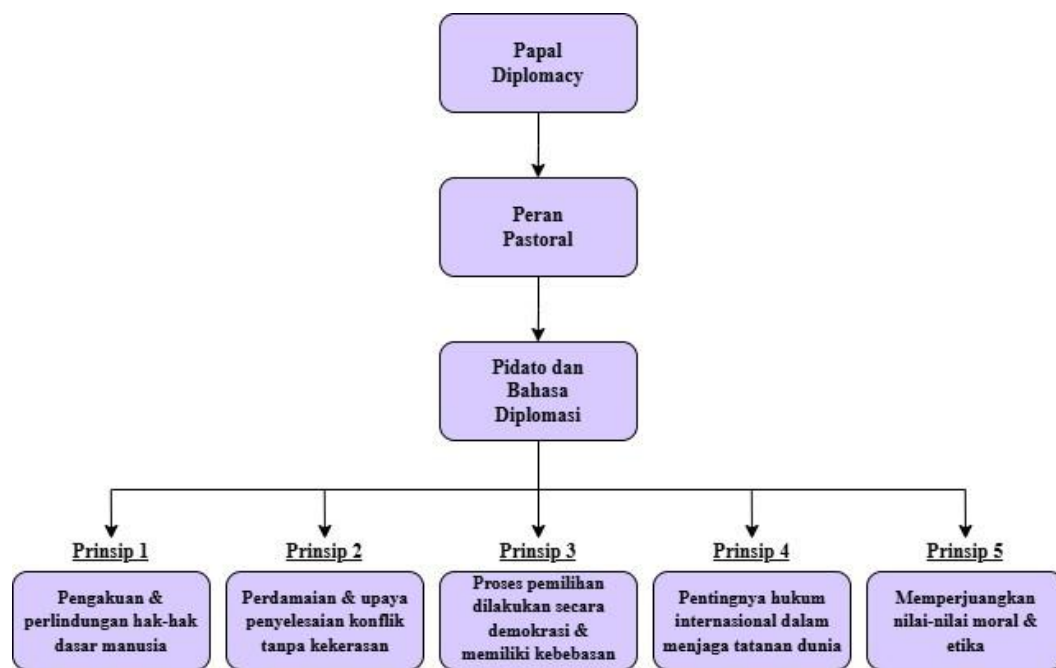
1.4.2 Pidato dan Bahasa Diplomasi

Dalam konteks hubungan internasional, bahasa mempunyai peran penting sebagai alat diplomasi yang efektif. Menurut Oglesby, bahasa diplomasi merupakan kumpulan kode, isyarat, hingga norma yang dikembangkan oleh komunitas diplomatik global demi memastikan kelancaran komunikasi meskipun berasal dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda (Oglesby, 2016). Tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi bagi antar negara, bahasa diplomatik juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menyampaikan pesan yang berkaitan dengan hubungan kerja sama internasional, perlindungan kepentingan nasional, hingga upaya untuk meredakan ketegangan dalam hubungan global (Oktaviani & Nursidah, 2025). Bahasa diplomatik dapat merujuk pada bentuk, gaya, atau ekspresi tertentu yang digunakan dalam menyampaikan pernyataan resmi.

Pidato sebagai salah satu bentuk komunikasi resmi, mendukung diplomasi melalui penyampaian pesan yang mencerminkan arah politik dari suatu negara. Terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait bahasa diplomasi yang digunakan pidato, diantaranya adalah pidato Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Konferensi Jepang - Ukraina untuk promosi pertumbuhan ekonomi dan rekonstruksi. Penelitian Selanjutnya adalah pidato yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada Korps Diplomatik Vatikan (Oktaviani & Nursidah, 2025; Laskowska & Marcyński, 2022). Salah satu ciri karakteristik bahasa diplomasi adalah pemilihan kata-kata yang mempunyai satu atau lebih makna secara umum

dan satu makna khusus. Bahasa diplomasi cenderung memilih untuk tidak menggunakan bahasa yang bersifat sensitif, agresif, menyinggung, hingga merusak (Bobeica, 2021). Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik dengan publik yang menjadi sasaran pidato (Bobeica, 2021).

1.5 Sintesa Pemikiran



Merujuk pada sintesa pemikiran diatas, penulis menggunakan teori *Papal Diplomacy* sebagai teori dasar yang akan digunakan dalam analisis penelitian ini. Teori tersebut mempunyai dua peran, salah satunya adalah peran pastoral yang akan merujuk kepada lima prinsip untuk melakukan kegiatan diplomatik. Kelima prinsip itu adalah sebagai berikut, **Pertama** adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar setiap manusia di berbagai aspek kehidupan, **Kedua** prinsip untuk menekankan pentingnya perdamaian dan upaya menyelesaikan perselisihan tanpa kekerasan. **Ketiga** yaitu proses pemilihan dilakukan secara demokrasi dan harus memiliki kebebasan, **keempat** adalah penekanan akan pentingnya hukum

internasional dalam menjaga tatanan dunia. **Kelima** yaitu bentuk memperjuangkan nilai-nilai moral dan etika.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang masalah hingga kerangka berpikir yang telah dijelaskan, penulis berargumen bahwa dalam pelaksanaan kegiatan diplomatiknya, Paus Fransiskus sebagai otoritas tertinggi *The Holy See* sekaligus menjadi kepala negara Vatikan menunjukkan penggunaan kelima prinsip dari peran pastoral melalui pidato-pidatonya. Implementasi prinsip pertama terkait pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar setiap manusia di berbagai aspek kehidupan, dapat terlihat pada kalimat yang disampaikan Paus Fransiskus kepada Aung San Suu Kyi melalui Yesuit Myanmar saat kunjungan Apostoliknya di Asia. Bunyi dari kalimat tersebut adalah *“I offered the Vatican as a place of refuge for her”*. Selanjutnya pada prinsip kedua yang menekankan pentingnya perdamaian dan upaya menyelesaikan perselisihan tanpa kekerasan, dapat dibuktikan melalui pernyataan Paus Fransiskus setelah memanjatkan Doa Angelus pada saat Misa minggu di Santo Petrus. Kalimat yang menandakan upaya penyelesaian konflik tanpa kekerasan berbunyi *“let the weapons fall silent, and may a sincere and inclusive dialogue begin, capable of ensuring lasting peace.”* Prinsip ketiga adalah prinsip penekanan bahwa demokrasi yang autentik, proses pemilihan harus dilakukan dengan kesadaran penuh, pengetahuan yang memadai, dan kebebasan dalam menentukan pilihan, dimana hal ini disampaikan oleh Paus Fransiskus setelah Doa Angelus pada saat Misa minggu di Santo Petrus. Pernyataan Paus Fransiskus berbunyi sebagai berikut *“that set the country on its way to independence, and in the prospect of a peaceful and democratic season that it is still struggling to achieve today”*.

Prinsip keempat adalah penekanan akan pentingnya hukum internasional dalam menjaga tatanan dunia, dapat dibuktikan saat Paus Fransiskus menyampaikan *Urbi et Orbi* pada saat natal dan berdoa untuk damai. Kalimat doa yang disampaikan Paus Fransiskus adalah sebagai berikut *“intolerance and violence not infrequently target the Christian community and its places of worship, clouding the peaceful countenance of that people”*. Prinsip kelima sekaligus menjadi prinsip terakhir dari *Papal Diplomacy* yaitu memperjuangkan nilai- nilai moral dan etika, dapat dibuktikan saat Misa Minggu bersama dengan umat Katholik Myanmar yang berada di Vatikan. Kalimat tersebut berbunyi *“Amid war, violence, and hatred, fidelity to the Gospel and being peacemakers calls for commitment”*.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif menurut Whitney (Whitney, 1937) adalah suatu upaya untuk mendapatkan fakta disertai dengan penafsiran yang tepat. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menganalisis kondisi, proses, pandangan sebenarnya, serta perubahan yang sedang terjadi.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat penulis, jangkauan penelitian yang digunakan pada penelitian ini hanya berfokus pada keterlibatan Paus Fransiskus dalam merespon konflik Myanmar pada tahun 2021 hingga 2025. Pemilihan rentang waktu tersebut didasarkan pada awal terjadinya konflik hingga respons terakhir yang diberikan oleh Paus Fransiskus selama masa hidupnya.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui pidato-pidato yang disampaikan Paus Fransiskus, dan didukung dengan studi pustaka sebagai data sekunder lain seperti: jurnal, buku, hingga website resmi milik Vatikan. Penulis mengumpulkan pidato-pidato milik Paus Fransiskus yang akan dipakai menggunakan lima prinsip *Papal Diplomacy*.

Tabel 1 2. Kumpulan pidato Paus Fransiskus

Tanggal	Lokasi	Sasaran Pidato
7 Februari 2021	Lapangan Santo Petrus	Publik
8 Februari 2021	Vatikan	Korps Diplomatik
17 Maret 2021	Apostolik Vatikan secara daring	Publik
5 April 2021	<i>Urbi et Orbi</i> saat Paskah di Basilika Santo Petrus	Masyarakat Myanmar terkhusus generasi muda
16 Mei 2021	Misa di Basilika Santo Petrus	Umat Katolik Myanmar yang tinggal di Roma
19 Juni 2022	Doa Angelus saat Misa minggu di Santo Petrus	Komunitas dan organisasi internasional terkait kemanusiaan
25 Desember 2021	<i>Urbi et Orbi</i> saat Natal	Publik
September 2024	Pertemuan dengan Jesuit Asia saat	Kelompok militer Myanmar dan keluarga Aung San Suu Kyi

Sumber: (vatican news, 2021), (ncregister, 2024), (international la croix, 2024) (licas news, 202), (vatican news, 2022)

Catatan: Hasil konstruksi Penulis

Berikut sumber-sumber kredibel yang didapatkan penulis untuk kumpulan pidato-pidato Paus Fransiskus (vatican news, 2021; ncregister, 2024; international la croix, 2024; licas news, 2021; vatican news, 2022). Selanjutnya penulis akan memilih dan

memilah pidato-pidato yang sesuai dengan lima prinsip *Papal Diplomacy*.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengkaji penggunaan pidato Paus Fransiskus dalam praktik Papal Diplomacy adalah teknik analisa data wacana. Menurut Surendra Pockhrel, analisis data wacana untuk pidato diplomatik terbagi atas tiga bagian, yaitu: salam pembuka, isi atau konten utama, dan pernyataan penutup.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penulis memberikan penjabaran terkait sistematika penulisan kedalam 4 bab, untuk menjelaskan masing-masing bagian berdasarkan topik penelitian yang dipilih. Berikut penjelasan isi setiap babnya:

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argument utama, teknik dan metode pengumpulan data, hingga sistematika penulisan.

BAB II pada bagian ini penulis akan membahas terkait dua prinsip Papal Diplomacy, yaitu prinsip pertama pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar setiap manusia di berbagai aspek kehidupan. Prinsip kedua prinsip untuk menekankan pentingnya perdamaian dan upaya menyelesaikan perselisihan tanpa kekerasan.

BAB III Selanjutnya pada bagian ini penulis akan membahas tiga prinsip Papal Diplomacy lainnya, yaitu prinsip ketiga di mana proses pemilihan dilakukan secara demokrasi dan harus memiliki kebebasan. Prinsip keempat terkait penekanan akan pentingnya hukum internasional dalam menjaga tatanan dunia, dan prinsip kelima

bentuk memperjuangkan nilai-nilai moral dan etika.

BAB IV sekaligus menjadi bagian terakhir akan membahas mengenai kesimpulan dari penelitian, saran dan kritik yang dapat diberikan kepada penulis sebagai evaluasi untuk penelitian ini.